

**Keberadaan Bumdes Suka Jaya dalam Pelayanan Masyarakat
(Studi Kasus Di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten
Batubara)**

Saidatul Akida¹, Andia Fitrah Wardani², Anggun Dwi Nanda Nst³, Ahmad Fauzi⁴, M. Imam Malik⁵,

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (C)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU

Abstrak

Desa Suka Jaya adalah salah satu desa di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Suka Jaya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Padahal melalui BUMDes ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam indikator-indikator tata kelola BUMDes, serta memberikan gambaran awal mengenai praktik tata kelola BUMdes yang sudah berjalan. Untuk itu dalam kajian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan tata kelola badan usaha milik desa, perlu adanya sinergi lebih lanjut untuk merumuskan sebuah standard operating prosedur (SOP) agar menjadi pedoman pelaksanaan setiap UMKM yang ingin menjual produknya atau menitipkan produknya kepada BUMDes. Selanjutnya badan usaha milik desa dapat memasarkan produknya kepada e-commerce, agar aktivitas pasar jual beli menjadi lebih luas tidak hanya bergelut di satu daerah saja. Dengan demikian badan usaha milik desa dapat memberikan multiplier effect bagi seluruh masyarakat desa suka Jaya.

Kata Kunci: *Bumdes, Masyarakat, Pelayanan*

Abstract

Suka Jaya Village is one of the villages in Indonesia that has abundant natural resource potential. In the midst of increasingly rapid technological developments, the Ciharang Village Owned Enterprises (BUMDes) are not developing as they should. Whereas through BUMDes, it is intended to improve welfare and empower the community. This research contributes to the indicators of BUMDes governance, as well as provides an initial overview of the existing BUMdes governance practices. For this reason, in this study the author uses qualitative research methods with data collection through in-depth interviews, observations and literature studies. The results of this study indicate that in developing village-owned enterprise governance, there is a need for further synergy to formulate a

standard operating procedure (SOP) so that it becomes a guideline for the implementation of every MSME who wants to sell their products or entrust their products to BUMDes. Furthermore, village-owned enterprises can market their products to e-commerce, so that buying and selling market activities become wider, not just working in one area. Thus, village-owned enterprises can provide a multiplier effect for the entire community of Sukajaya village.

Keyword : Village-owned enterprises, service

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah hingga tersebar di seluruh wilayahnya. Kekayaan alam ini semestinya dapat menjadi kapital kuat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Apalagi dalam konteks otonomi daerah, setiap daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Potensi sumber daya yang sejatinya apabila dapat dikelola dengan baik akan mendapatkan hasil yang luar biasa besarnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki implikasi yang luar biasa pada pembangunan desa. Undang-Undang tersebut membuat sebuah desa menjadi subjek dan pelaku pembangunan bukan lagi objek pembangunan. Undang-Undang Desa tersebut memberikan kedaulatan dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya secara mandiri (Presiden RI, 2014).

Desa Suka Jaya adalah desa di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki potensi dalam bidang perikanan dan pariwisata. Masyarakat desa Suka Jaya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan rendah. Desa Suka Jaya awalnya hanya memiliki penghasilan kurang dari 20 juta perbulan. Pendapatan yang minim ini membuat pemerintah desa berinisiatif mengembangkan usaha, akhirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Suka Jaya sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Pendirian usaha desa ini atas kesepakatan pemerintah dan warga masyarakat. Meskipun sebenarnya BUMDes sudah ada sebelum adanya UU Desa. Namun keberadaannya semakin strategis karna peran pentingnya sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa.

Salah satu usaha BUMDes Suka Jaya berupa pemasangan wifi ke warga, pakan ikan untuk tambak dan pemotretan. Namun, banyak usaha yang dikelola warga tidak berhasil, seperti tambak ikan, yang dikarnakan kurangnya penyuluhan untuk warga. Membuat pendapatan BUMDes Suka Jaya perlahan menurun. Pada aspek ini pula, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes menjadi sangat diperlukan karna dari sisi mata pencarian masyarakat desa Suka Jaya akan mengalami alih fungsi pekerjaan dari Nelayan menjadi pelaku bisnis.

Tujuan dari tulisan ini yaitu (1) untuk mengetahui sistem pengembangan pengelolaan BUMDes desa Suka Jaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) menyusun indikator-indikator tata kelola BUMDes (3) memberikan gambaran awal mengenai praktik tata kelola BUMDes yang sudah berjalan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga di desa yang menjalankan fungsi pengelolaan potensi dan aset desa; dan sebagai penyedia layanan usaha bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal

(Ramadana, Ribawanto, dan Suwondo, 2013). Di balik tujuan BUMDes yang sangat baik, sangat disayangkan belum ada payung hukum bagi BUMDes.

Saat ini, masalah BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya BUMDes belum memiliki dasar legalitas yang kuat sebagai lembaga ekonomi desa. Padahal peran dan fungsi BUMDes sangat penting dalam meningkatkan taraf ekonomi warga masyarakat (Theresia, 2018). Pembentukan BUMDes dapat dilakukan dengan alokasi dana desa. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dipahami oleh para kepala desa dan masyarakat. Penelitian (Ade Setiawan 2019) menemukan bahwa seringkali, Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa hanya difokuskan pada perbaikan fisik infrastruktur desa karena pandangan masyarakat saat ini pembangunan yang berhasil terpaku pada keadaan infrastruktur. Akibatnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan yang produktif seperti BUMDes, Bank Desa, dan Pasar Desa sebagai penyedia pinjaman modal bergilir tanpa bunga bagi kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah justru digunakan untuk perbaikan konstruksi fisik desa (Hehamahua, 2015).

Peran dan Manfaat BUMDes

Kehadiran UU desa telah mendorong terciptanya konsep mengenai 'tradisi berdesa'. Eko (2014) mendefinisikan tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa, dengan inti gagasan:

1. desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat

Jika dihubungkan dengan BUMDes, maka BUMDes merupakan pengejawantahan dari konsep tradisi berdesa (Putra 2015), khususnya dalam perannya, pertama, sebagai bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif, antara masyarakat bersama pemerintah desa. Usaha ekonomi ini haruslah mengandung unsur bisnis ekonomi sekaligus sosial. Kedua, BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. BUMDes memungkinkan desa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga meningkatkan pendapatan asli desa (Pades) dan kesejahteraan masyarakatnya (Chikamawati 2015). Ramadana *et. al* (2014) menempatkan badan usaha milik desa sebagai unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Jika dirinci lagi, kontribusi BUMDes untuk penguatan ekonomi desa adalah sebagai berikut (Ramadana 2014):

1. Sebagai sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa
2. Pemenuhan kebutuhan masyarakat
3. Pembangunan desa secara mandiri

Keberadaan BUMDes di suatu desa dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial, sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes yang tercantum dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Penelitian Alkadafi (2014) di Desa Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan keberadaan BUMDes yang bergerak dalam bisnis usaha simpan pinjam berhasil memberikan akses modal kepada masyarakat, menciptakan pengaturan pengelolaan pasar desa sekaligus pembangunan infrastrukturnya, memberikan pelayanan kepada warga di bidang penerangan, dan meningkatkan PADes. Hal sejalan juga diindikasikan pada penelitian Syukran (2016) di Desa Bareng. Hekmatyar et. al (2018) dalam penelitiannya di Desa Kedungprimen, Bojonegoro, menemukan keberadaan BUMDes telah memberikan kontribusi melalui alokasi hasil usaha untuk berbagai kebutuhan, seperti perbaikan pelayanan umum, pendidikan, dana sosial yang menyalurkan ke fakir miskin dan anak yatim, dan alokasi kesejahteraan desa yang meskipun belum menyentuh semua lapisan masyarakat (hanya dirasakan aparat desa). Selama ini, pelayanan desa cenderung rendah karena terhambat pemasukan dana. Dengan adanya BUMDes, diharapkan akan terjadi aliran dana yang berguna bagi peningkatan layanan di tingkat desa. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan keberadaan unit-unit usaha yang terjangkau, baik dari segi harga maupun jarak akses.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa sehingga memunculkan dampak sosial yang lebih luas (Widodo 2016). Salah satu dampak sosial tersebut adalah menekan laju urbanisasi karena BUMDes berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Penelitian (Kasila 2018) di Desa Ponggok menunjukkan keberhasilan BUMDes dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda melalui pengelolaan pariwisata khususnya Umbul Ponggok. Lebih jauh, keberadaan BUMDes juga berperan dalam menciptakan iklim optimisme terhadap kemampuan desa sendiri sehingga masyarakat menjadi bangga terhadap desanya.

Konsep Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan (*welfare*) menurut Suharto (2006), setidaknya mengandung 4 makna, yaitu sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan sosial, dan sebagai proses atau usaha terencana. Namun dalam penelitian ini, konsep kesejahteraan yang akan digunakan menunjuk pada makna kondisi sejahtera (*well-being*). Menurut Fahrudin (2012) dalam Rosni (2017), Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Menurut Badan Pusat Statistik (2005) dalam Sugiharto (2007), indikator yang digunakan BPS untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Hasil pengukuran taraf hidup dapat menunjukkan posisi kesejahteraan rumah tangga, yaitu di tingkat kesejahteraan rendah, sedang atau tinggi.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini disusun untuk menguji hubungan manfaat BUMDes Suka Jaya dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga lapisan bawah di desa Suka Jaya. Hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara manfaat BUMDes dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga
2. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara manfaat ekonomi BUMDes dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga
3. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara manfaat sosial BUMDes dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang holistik dan kompleks. Bogdan dan Taylor dalam Johannes Basuku (2018), mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui partisipasi observasi pada kegiatan BUMDes di Desa Suka Jaya, wawancara mendalam dilakukan dengan para pengelola BUMDes, yaitu 1. Ketua Bumdes Suka Jaya 2. Salah satu pegawai/ anggota badan usaha milik desa; 3. Wawancara kepada salah satu warga masyarakat sebagai pihak konsumen BUMDes, serta adanya studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Suka Jaya

Desa Suka Jaya adalah desa di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Suka Jaya mempunyai kode wilayah menurut kemedagri 12.19.06.2016. Sedangkan kodeposnya adalah 21253. Desa Suka Jaya ini terletak di daerah pesisir pantai. Mata pencaharian dari masyarakat di daerah sekitar adalah sebagai nelayan.

Perkembangan BUMDes Suka Jaya

Perkembangan bumdes Suka Jaya sangat miris, karena ada masalah internal di dalam tubuh bumdes tersebut, karena permasalahan tersebut Bumdes Suka Jaya sekarang tidak ada program yang dilakukan, padahal pada awal dibentuk bumdes ini memiliki beberapa program unggulan, seperti pemasangan wifi, pemotretan, dan pakan ikan untuk masyarakat yang memiliki usaha tambak, karena kurangnya sosialisasi dari perangkat desa atau pun bumdes itu sendiri, banyak usaha warga yang tidak jalan, seperti tambak yang gagal panen, untuk pemotretan di masa covid 19 sangat tidak jalan, dan hampir tidak ada pemasukan dari pemotretan di masa covid 19, tetapi Bumdes Suka Jaya sudah mulai berbenah dan akan membentuk pengelola bumdes yang baru, agar Bumdes Suka Jaya kembali bisa menjadi penyokong desa untuk menjadi lebih berkembang lagi.

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti pada saat ini bumdes Suka Jaya memiliki program yang cukup berjalan efektif hingga pada saat ini yakni bidang pemotretan atau fotografi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh Kepala Bumdes Suka Jaya yakni bapak ialah : *“ mengapa bumdes lebih memilih bidang fotografi untuk program kesejahteraan masyarakat dikarenakan, karena jika dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat desa ini lebih lancar di bidang tersebut dan saya juga sudah lama memiliki skill di bidang fotografi ini. Sebenarnya ada juga ide atau anjang-ancang yang sudah disiapkan untuk usaha lain seperti misalnya pelaminan, teratak, dan lainnya. Jadi bisa banyak orang yang kerja gitu, kalau fotografi ini kan dia cuma 2 anggota jadi tidak perlu banyak-banyak orang.”* Kata ketua Bumdes Suka Jaya.

Jalannya program fotografi ini sudah jalan sekitar 6 tahun. Sejak awal bumdes sudah ada dan berjalan lancar. Dana dimasukkan ke bumdes, biasanya job seminggu 3 kali kadang 2 kali.

Harga penyewaan biasanya tergantung kualitas, kalau kualitas tinggi harganya pun tinggi. Untuk biaya modal awal alat hampir 20 jutaan, beli 1 set. 1 kamera ada 2 lensa. Untuk harga batre 500 ribu. Tiap tombol kamera punya fungsinya masing-masing. Alat pertama yg dikeluarkan bumdes

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan Manfaat Bumdes Suka Jaya Mandiri Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran BUMDes disajikan pada Mayoritas masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran BUMDes Suka Jaya pada tingkat yang tinggi, disusul dengan tingkat manfaat rendah sebesar. Jika dirinci berdasarkan mata pencaharian utama kepala keluarga, manfaat BUMDes pada tingkat yang tinggi dirasakan oleh responden kelompok mata pencaharian sebagai nelayan, buruh, petani, dan pedagang atau wiraswasta.

Keuntungan bidang potografer bagi masyarakat pastinya kalo masyarakat mau pesta dan ingin memerlukan jasa kami, maka harga bisa lebih murah perkiraan 1,2 juta. Lain untuk yg luar desa biasanya pakatnya sekitar 1,5 jutaan

Khairul yg handle urusan progja forografi dari awal berdirinya bumdes suka jaya.

1. Manfaat Ekonomi BUMDes Suka Jaya

Adapun manfaat Ekonomi BUMDes suka Jaya bagi masyarakat adalah dapat membantu perekonomian masyarakat, yang mana bumdes ini bergerak dan mengelola asset-asset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak didalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pemebentukannya. Tingkat manfaat ekonomi BUMDes Suka Jaya dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan mata pencahariannya, sehingga total skor yang didapat dari 3 butir pertanyaan mengenai manfaat ekonomi merupakan skor akhir yang menentukan kategori tingkat manfaatnya, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Responden yang merasakan tingkat manfaat ekonomi kategori tinggi berasal dari kelompok mata pencaharian pedagang/wiraswasta dan PNS. Kelompok mata pencaharian buruh dan pegawai swasta merasakan manfaat ekonomi BUMDes pada kategori sedang, sedangkan responden bermatapencaharian petani merasakan manfaat ekonomi pada tingkat rendah.

2. Manfaat Sosial BUMDes Suka Jaya

a. Berdaya dengan BUMDes Suka Jaya

Responden yang menyatakan bahwa dirinya atau pasangannya diberdayakan oleh desa semenjak kehadiran BUMDes Suka Jaya Bentuk pemberdayaan yang kentara dalam penelitian ini adalah terlibatnya responden dalam kegiatan UKM (usaha kecil menengah). UKM ini memang bukan bentuk BUMDes Suka Jaya namun berkembangnya usaha BUMDes di bidang fotografi. BUMDes Suka Jaya berperan terutama dalam bidang pemotretan karena hingga pada saat ini pemotretan itu yang sangat berjalan. Selain pemotretan juga ada tambak ikan dan pemasangan wifi untuk para warga yang ingin memasangnya.

Desa Suka Jaya memiliki lembaga pengelolaan amal dan zakat yang sudah memiliki badan hukum dan izin kegiatan. Lembaga ini merupakan lembaga yang juga bersentuhan langsung dengan BUMDes Suka Jaya. Setiap karyawan yang bekerja di BUMDes, gajinya otomatis akan disalurkan 2,5% setiap bulan melalui Lazizawa sebagai bentuk infak. Dana-dana amal yang dialirkan oleh BUMDes Suka Jaya selanjutnya dikelola oleh Lazizawa secara independen untuk disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk santunan kepada anak yatim, jompo, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula program satu rumah satu sarjana, program paket sembako setiap hari raya, dan beasiswa bagi anak sekolah yang berprestasi.

Sebagian besar responden yang merasa terbantu dengan adanya dana sosial ini berasal dari kelompok mata pencaharian nelayan, Buruh, Petani, dan Pedagang/ wiraswasta. Bagi ketiga kelompok

ini, meski bantuan tidak terlalu besar secara nominal namun mereka merasa bantuan tersebut sangat berarti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kenapa bumdes lebih memilih bidang potografi?
Karena jika dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat desa ini lebih lancar di bidang tsb, dan saya juga sudah lama memiliki skill di bidang fotografi ini.
2. Adapun Keuntungan bidang potografer bagi masyarakat jika ada masyarakat yang membutuhkan jasa pemotretan berbagai acara biaya yang dikeluarkan itu bisa lebih murah apalagi yang menyewa itu masyarakat asal asli daerah sana. Contohnya, pastinya kalo masyarakat mau pesta dan ingin memerlukan jasa kami, maka harga bisa lebih murah perkiraan 1,2 juta. Lain untuk yg luar desa biasanya pakatnya sekitar 1,5 jutaan
Khairul yg menghandle urusan progja fotografi dari awal berdirinya bumdes suka jaya.
3. Pada saat ini yang sangat berjalan program kerja dari BUMDes Suka Jaya hanya dari Pemotretan dan InsyaAllah dikepengurusan baaru ini nantik sudah banyak sekali planning yang akan dilakukan.
Desa Suka Jaya memiliki lembaga pengelolaan amal dan zakat yang sudah memiliki badan hukum dan izin kegiatan. . Dana-dana amal yang dialirkan oleh BUMDes Suka Jaya selanjutnya dikelola oleh Lazizawa secara independen untuk disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk santunan kepada anak yatim, jompo, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula program satu rumah satu sarjana, program paket sembako setiap hari raya, dan beasiswa bagi anak sekolah yang berprestasi.

Saran

Berikut merupakan beberapa saran dari penulis, baik kepada Pengurus BUMDes Suka Jaya untuk kepentingan penelitian berikutnya:

1. Pengurus BUMDes Suka Jaya sebaiknya terus mempertahankan kontribusinya dalam memberi manfaat sosial yang tinggi kepada masyarakat lapisan bawah. Pengurus juga perlu mengupayakan agar masyarakat lapisan bawah lebih mudah dalam mengakses manfaat ekonomi dari kehadiran BUMDes sehingga tidak hanya cenderung dirasakan oleh lapisan masyarakat tengah dan atas, misalnya dengan pembuatan sarana-sarana pendukung pariwisata yang menyerap tenaga kerja dari lapisan bawah masyarakat
2. Pengurus BUMDes Suka Jaya perlu meningkatkan inovasi dan perluasan bidang pariwisata sehingga ikon Desa Suka Jaya tidak hanya bertumpu pada Umbul Suka Jaya yang saat ini telah mulai memasuki masa jenuhnya.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai usaha masyarakat di bidang fotografi, perikanan yang dikelola Pokdarwis karena erat kaitannya dengan usaha BUMDes dalam pengelolaan pemotretan sumber daya lokal dan potensi SDA Suka Jaya.

DOKUMENTASI :



DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi M. 2014. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik desa menuju *Asean Economic Community* 2015. *El-Riyasah* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 5(1): 32-40. Dapat diunduh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/656/610>
- Budiono P. 2015. Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Bojonegoro. Studi di desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor. *Jurnal Politik Muda*[internet]. [diunduh 2016 Okt 21]; 4(1): 116-125. Dapat diunduh dari: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2019. *Berita Resmi Statistik*. No. 56/07 /Th. XXII [internet]. [diunduh 2019 Agu 28] Dapat diunduh dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Chikamawati Z. 2015. Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Journal & Proceeding FEB Unsoed* [internet]. [diunduh pada

- 2017 Jan 1]; 5(1): -. Dapat diunduh dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/603/pdf/47>
- Eko S, FPPD. 2013. Membangun BUMDes yang mandiri, kokoh dan berkelanjutan [policy paper].[internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]. Dapat diunduh dari [https://www.academia.edu/10367542/Badan Usaha Milik desa](https://www.academia.edu/10367542/Badan_Usaha_Milik_desa)
- Eko S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta (ID): FPPD.
- Hekmatyar V, Nugroho F. 2018. Badan usaha milik desa dan pembangunan sosial di Kabupaten Bojonegoro. *Sosio Konsepsia*[internet].[diunduh pada 2019 Sep 3]; 7(3): 176-189. Dapat diunduh dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1444/854>
- Kasila M. 2018. Partisipasi pemuda desa dalam perkembangan usaha BUMDes “tirta mandiri”. Sstudi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. *JSKPM*[internet].[diunduh pada 2019 Sep 9]; 2(1): 43-58. Dapat diunduh dari <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- Kusuma GH, Sari NP, Susilo B, Komara EK. 2016. BUMDes: kewirausahaan sosial yang berkelanjutan. Analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik desa di desa Ponjong, desa Bleberan, dan desa Sumbermulyo. *Policy paper*[internet]. [diunduh pada 2016 Des 9]. Dapat diunduh dari: <http://jembataniga.com/wp-content/uploads/BUMDes-Kewirausahaan-Sosial-yang-Berkelanjutan.pdf>
- [Pattiro] Pusat Telaah dan Informasi Regional. 2016. Mempertanggung Badan Usaha Milik desa untuk Menggerakkan Ekonomi desa [policy brief]. [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]. Dapat diunduh dari <http://pattiro.org/2016/11/mempertanggung-badan-usaha-milik-desa-untuk-menggerakkan-ekonomi-desa/>
- Putra AS. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta (ID): Kemendes PDTT
- Ramadana CB, Ribawanto H, Suwondo. 2014. Keberadaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa. Studi di desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *JAP*[internet]. [diunduh 2016 Okt 21]; 1(6): 1068-1076. Dapat diunduh dari: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/189/169>
- Ridwan Z. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justicia* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 8(3): 424-440. Dapat diunduh dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/314/273>
- Rosni. 2017. Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *J. Geografi*.[internet]. [diunduh pada 2017 Mar 28]; 9(1): 53-66. Dapat diunduh dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/issue/view/875/showToc>
- Sayutri HM. 2011. Pelembagaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Academica* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 3(2): 717-728. Dapat diunduh dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2289/1482>
- Sugiharto E. 2007. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan desa Banua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *JEPP*. [Internet]. [diunduh pada Mar 7 2017]; 4(1): 32-36. Dapat diunduh dari <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-4-no-1-eko.pdf>